Tribun Jogja

KAMIS LEGI
21 APRIL 2016 | 9

Perguruan Tinggi Diminta Ikut Wujudkan Pemilu Bersih

YOGYA, TRIBUN - Mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis, pemerintah telah memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebagai pengawas dari penyelenggaraan pemilu. Namun, untuk membantu terwujudnya pemilu yang demokratis dan bersih dibutuhkan peran langsung Perguruan Tinggi dan masyarakat untuk membantu Bawaslu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam seminar Internasional bertajuk "Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu" di Convention Hall Asri Medical Center (AMC), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (20/4).

"Sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak menutup kemungkinan jika dalam tubuh penyelenggara Pemilu terjadi pelanggaran kode etik. Banyak kasus-kasus yang memperlihatkan bahwa calon maupun peserta pemilu, ikut menyumbang peluang terjadinya pelanggaran kode etik dalam pemilu," ujar Jimly Asshiddiqie, dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY.

Menurutnya, untuk mencegah pelanggaran kode etik yang ada dalam pemilu, DKPP melakukan kampanye pencegahan kepada para pemangku kepentingan. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, tentunya akan mewujudkan kapasitas maupun perilaku etis para pemimpin bangsa yang berkualitas.

"Karena untuk mewujudkan pemilu yang bersih, diperlukan strategi pencegahan pelanggaran kode etik yang baik. Keterlibatan perguruan tinggi, menurut dia, sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia," ujar Jimly.

Sementara itu, sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik tersebut dapat dilakukan kegiatan sosialisasi kepada berbagai pihak seperti parpol, perguruan tinggi, serta DKPP dengan konsep berbasis tatap muka dan melalui media massa.

"KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya perlu meningkatkan kapasitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga kredibilitas penyelenggara pemilu akan tetap terjaga," tambahnya.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, Ketua Badan Pengawasan Pemilu RI, keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan pemilu juga sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

"Indonesia menjadi salah satu Negara paling demokratis di dunia. Seluruh masyarakat dan stakeholder harus aktif dalam mengawasi pemilu. Sebab, hakikatnya pemilu adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," terangnya. **(una)**